

Peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam pelaksanaan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia 2011-2025 = The role of Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia on implementation of masterplan for acceleration and expansion of economic development 2011-2025 / Rima Monika

Rima Monika, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20329487&lokasi=lokal>

Abstrak

Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011- 2025 merupakan politik pembangunan ekonomi Indonesia yang didasari pada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam pelaksanaan MP3EI didasarkan oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Dalam pelaksanaan kegiatan MP3EI terdapat berbagai macam kendala, diantaranya kendala dalam pembiayaan, kendala dalam mendatangkan investor dan kendala dalam koordinasi dalam mempermudah ijin dan penyediaan lahan yang terkena dalam program MP3EI. Kendala pembiayaan ini terjadi karena terbatasnya APBN yang ada dalam mendukung MP3EI, hal ini memaksa pemerintah untuk mengadakan kerjasama dengan pihak investor yang mau membiayai sebagian Program MP3EI yang tidak mampu dibiayai oleh pemerintah. Dalam mendatangkan investor asing dari luar negeri seharusnya tidak akan menjadi masalah jika mengikut sertakan Kementerian Luar Negeri dalam mendorong kegiatan MP3EI sebagai bagian dari anggota Komite Pelaksana Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI). Sebenarnya Kementerian Luar Negeri dapat memainkan peran yang sangat strategis dalam MP3EI seperti melakukan promosi program MP3EI, mengundang investor asing yang terbaik dan dapat digunakan dalam melakukan negosiasi ekonomi yang strategis dalam rangka mendorong MP3EI. Peran-peran tersebut akan dengan mudah dikerjakan karena Kementerian Luar Negeri memiliki perwakilan diplomat diseluruh Negara sahabat, oleh karena itu keuangan Negara akan lebih efisien sehingga tidak membuat lembaga baru dalam mendukung MP3EI.

<hr>

ABSTRACT

Masterplan for the Acceleration and Enlargement of Economic Development in Indonesia 2011-2025 is an Indonesian economic development politics based on national long term development term 2005-2025. In its implementation it is based on the presidential regulation number 32 of 2011 on Masterplan for the Acceleration and Enlargement of Economic Development in Indonesia. When implementing MP3EI activities several problems are faced such as problems in financing, problems in attracting investors and problems in coordination to facilitate license and area provision, included in MP3EI program. Problems in finance takes place due to limited state budget that support MP3EI. The financial constraints are due to the limited APBN (National Revenues and Expenditures Budget) that is available to support MP3EI. This situation enforces the government to make a cooperation with investors that are willing to finance some of MP3EI's programs not be able to be financed by the government. Bringing foreign investors is not supposed to be a problem if Ministry of Foreign Affairs becomes active to encourage the MP3EI activities as a member of KP3EI. Actually, Ministry of Foreign Affairs could play a strategic role in promoting programs

in MP3EI by inviting good foreign investors and also could make a strategic economic negotiation in order to encourage MP3EI. These roles could be easily done because Ministry of Foreign Affairs has diplomatic representatives throughout the friendly nations. Therefore, public finance will be more efficient, and the government does not create new institutions to support MP3EI.